

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat (Barros, Winaya, and Firdausi 2020). Terutama untuk perjalanan sehari-hari. Angkutan umum merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan dalam melakukan mobilitas (Said, Maitimu, and Talakua 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pasal 15 ayat 3 PP No 74 Tahun (2014) tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini menjadi dasar Bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan angkutan umum di Kota/Kabupaten masing-masing.

Di wilayah Kabupaten Gianyar dilayani oleh Angkutan Pedesaan sebagai penunjang mobilitas masyarakat dalam berkegiatan sehari – hari, Berdasarkan data yang kami dapatkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar secara administratif terdapat 13 trayek angkutan pedesaan, namun pada kondisi eksisting dilapangan hanya terdapat 3 trayek yang masih beroperasi yaitu Trayek Batubulan – Gianyar, Trayek Batubulan – Ubud – Payangan dan Trayek Batubulan – Ubud – Tegallalang.

Dalam hal penyelenggaraan oprasional angkutan pedesaan diperlukan penetapan tarif. Penetapan tarif harus ditetapkan dari tiga perspektif, yakni dari segi operator, sisi pengguna, dan sisi regulator Karena belum adanya Surat Keputusan Pemerintah tentang (Safitri 2016)

penetapan tarif, Operator menetapkan tarif secara sepihak dilapangan, dalam penetapannya Tarif yang dikenakan yaitu 20.000 pada semua trayek. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar trayek Batubulan – Gianyar yang memiliki panjang trayek paling pendek yaitu 21,8 km, dan trayek Batubulan – Ubud – Payangan memiliki panjang trayek paling panjang yaitu 26,6 km (Gianyar 2021). Hal ini menjadi masalah sebab adanya perbedaan jumlah panjang trayek yang dilalui dengan jumlah tarif yang harus dibayarkan, penetapan tarif juga belum seimbang dengan biaya operasional.

Oleh karena itu, evaluasi dan analisis perlu dilakukan mengenai tarif angkutan pedesaan di wilayah studi Kabupaten Gianyar. Untuk menciptakan tarif yang layak bagi operator dan pengguna jasa, harus ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk angkutan umum dan fasilitas yang diterima. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah tentang **"PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN BERDASARKAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN (BOK), ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) DI KABUPATEN GIANYAR"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapat identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tarif yang diterapkan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.792/AJ.205/DRJD/2021 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, dimana tarif yang dikenakan sama rata untuk semua trayek;
2. Tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Gianyar merupakan tarif yang ditetapkan sepihak oleh operator dengan kondisi pelayanan yang sama dengan jarak pelayanan yang berbeda;

3. Tarif angkutan pedesaan yang tidak sesuai dengan kondisi pelayanan dan kondisi jarak pelayanan yang berbeda, sehingga menyebabkan turunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan pedesaan.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menghitung tarif menggunakan metode BOK yang meliputi Tarif Pokok dan Tarif BEP?
2. Bagaimana perbandingan tarif dari sisi pengguna jasa berdasarkan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP)?
3. Bagaimana rekomendasi tarif angkutan pada trayek Batubulan - Gianyar, Batubulan – Ubud – Tegallalang dan Batubulan – Ubud - Payangan?

1.4 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terkait penetapan tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Gianyar, berdasarkan analisis BOK, ATP dan WTP

2. Tujuan

Tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah

- a. Untuk Mengetahui tarif yang sesuai dengan BOK yang meliputi Tarif Pokok dan Tarif BEP
- b. Untuk Mengetahui perbandingan tarif berdasarkan ATP dan WTP
- c. Memberikan rekomendasi tarif yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.792/AJ.205/DRJD/2021 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan

1.5 Batasan Masalah

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka dibuat Batasan masalah untuk memudahkan pengumpulan data, analisis serta pengolahan data. Adapun Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas 3 Trayek yaitu Batubulan - Gianyar, Batubulan – Ubud – Tegallalang dan Batubulan – Ubud – Payangan
2. Penelitian ini hanya mengkaji terkait perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan pedesaan, Perhitungan Tarif berdasarkan kemampuan untuk membayar (*Ability to Pay*), serta keinginan untuk membayar (*Willingness to Pay*), berdasarkan perbedaan jarak ketiga trayek, serta tidak menghitung penggunaan subsidi